

## IMPLEMENTASI PROGRAM DESA DIGITAL: PERSPEKTIF *DIGITAL GOVERNANCE* (STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025)

Fildza Jiharani Imamah<sup>1</sup>, Itok Wicaksono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Desa Digital di Desa Sidomulyo, Kabupaten Jember, dalam konteks digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, meskipun terdapat tantangan dalam hal keterbatasan infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi sangat penting untuk keberlanjutan program. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan efektivitas Program Desa Digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa lainnya dalam menerapkan digital governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**Kata Kunci:** *Desa Digital, Tata Kelola Digital, Efisiensi*

### A B S T R A C T

*This research aims to analyze the implementation of the Digital Village Program in Sidomulyo Village, Jember Regency, in the context of digital governance. The results showed that the program succeeded in improving efficiency, transparency and accountability in public services, despite challenges in terms of infrastructure limitations and community digital literacy. The research also found that the development of human resources (HR) and technological infrastructure is crucial for the sustainability of the program. Therefore, this study recommends continuous training and improved technological infrastructure to enhance the effectiveness of the Digital Village Program. The results of this study can serve as a reference for other village governments in implementing digital governance and improving the quality of public services.*

**Keywords:** *Digital Village, Digital Governance, Efficiency*

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received March, 2025

Revised March, 2025

Accepted March, 2025

Available online March, 2025

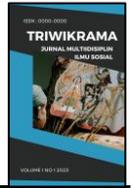
[fildzaji06@gmail.com](mailto:fildzaji06@gmail.com)

[itokwicaksono@unmuhjember.a](mailto:itokwicaksono@unmuhjember.ac.id)

[c.id](http://www.unmuhjember.ac.id)



This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

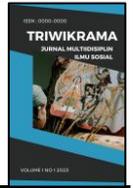


## 1. PENDAHULUAN.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di Indonesia, upaya digitalisasi telah digalakkan melalui inisiatif Desa Digital yang bertujuan menciptakan pelayanan masyarakat yang modern, transparan, efisien, dan responsif. Program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi digital di berbagai aspek pemerintahan desa, seperti administrasi, penyebaran informasi, dan pelayanan publik. Dalam era Revolusi Industri 4.0, sektor pemerintahan menjadi salah satu bidang yang terdampak signifikan. Menurut Hendriyadi, 2022 Transformasi digital pada sektor pemerintahan bertujuan utama untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat (Budiman, 2024). Desa Sidomulyo, yang terletak di Kabupaten Jember, merupakan salah satu contoh desa yang mulai menerapkan konsep Desa Digital. Dengan potensi besar di sektor pertanian dan sumber daya manusia, desa ini menyadari pentingnya transformasi digital untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui digitalisasi, Desa Sidomulyo berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi, mempercepat penyebaran informasi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Fenomena digitalisasi desa ini tidak hanya mencakup penggunaan aplikasi untuk pelayanan publik, tetapi juga mencakup perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Dengan adanya aplikasi seperti MallDesa, warga desa dapat mengakses berbagai layanan administratif dan informasi publik dengan lebih mudah. Hal ini sejalan dengan tren global menuju e-Government, di mana pemerintah berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan teknologi. Konsep ini selaras dengan tujuan e-Government Pemerintah Daerah Jember yang berfokus pada digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan pelayanan dan memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Desa Sidomulyo, dengan potensi besar di bidang pertanian dan sumber daya manusia, mengembangkan inovasi berbasis teknologi seperti aplikasi MallDesa. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administratif dan informasi publik. MallDesa juga mencakup konsep Smart Village untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Smart Citizen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan Smart Economy untuk mendorong inovasi ekonomi berbasis teknologi.

Dalam konteks Desa Sidomulyo, keberhasilan program Desa Digital tidak hanya bergantung pada penyediaan infrastruktur teknologi semata, tetapi juga pada kualitas brainware seperti operator Media Center, perangkat desa, dan masyarakat yang mengakses layanan berbasis digital. Software seperti aplikasi MallDesa, hardware berupa perangkat komputer dan server, serta jaringan internet sebagai komponen networking menjadi pilar utama dalam memastikan transformasi digital dapat berjalan dengan efektif. Fenomena menarik dalam penerapan program Desa Digital di Desa Sidomulyo adalah keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung keberhasilannya. Pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat memainkan peran masing-masing, mulai dari penyediaan infrastruktur teknologi, pelatihan literasi digital, hingga pemanfaatan layanan berbasis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya sinergi multi-aktor dalam membangun desa digital yang berkelanjutan. Namun, meskipun program ini memiliki potensi besar, berbagai tantangan masih harus dihadapi, seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur (akses internet terbatas), dan rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat. Setiap Aktor memiliki peran tersendiri seperti, (1)Pemerintah Desa (Media Center), Keberadaan Media Center Desa membantu menciptakan keterbukaan informasi dan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dengan cepat dan akurat. Selain itu, Media Center juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dan warganya, memfasilitasi umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan atau pelayanan desa. (2) Masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), berperan dalam mendukung literasi digital warga desa, sehingga teknologi baru dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh kalangan masyarakat. (3) Pihak Swasta, berkontribusi melalui kolaborasi dalam penyediaan infrastruktur digital, pelatihan teknologi, dan pengembangan aplikasi seperti MallDesa, yang memungkinkan desa memiliki layanan digital yang terintegrasi. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aktor-aktor tersebut menjadikan Sidomulyo mampu menghadapi tantangan transformasi digital dengan lebih efektif. aplikasi Mall Desa memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya aplikasi ini. Hal ini



dapat dilihat dari kemudahan dalam memilih fitur-fitur yang disediakan (Qadiri & Wicaksono, 2023).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Tata Kelola Desa***

Tata kelola desa bukanlah sekadar pengelolaan administratif oleh pemerintah desa, melainkan merupakan bentuk praktik pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sutoro Eko (2018) menekankan bahwa tata kelola desa yang efektif harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek (Sendhikasari et al., 2018). Artinya, desa harus memiliki ruang deliberatif yang memungkinkan warga terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendorong transformasi dari desa sebagai objek kebijakan menjadi aktor utama dalam pembangunan.

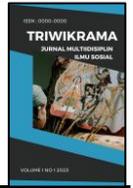
Dalam kerangka tersebut, Sutoro Eko (2018) menjelaskan bahwa tata kelola desa dibangun atas tiga unsur utama, yaitu Ide, Aktor-Institusi, dan Arena. Pertama, Ide berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengarahkan tata kelola desa menuju kemandirian, demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Ide ini diwujudkan melalui prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan musyawarah untuk mufakat. Kedua, Aktor dan Institusi merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa, yaitu kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan seluruh warga desa. Hubungan antaraktor ini diharapkan menciptakan sistem pemerintahan desa yang demokratis, berimbang, dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial melalui mekanisme check and balances. Ketiga, Arena merupakan ruang-ruang di mana aktivitas pemerintahan desa berlangsung, mencakup proses perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, penyediaan layanan publik, pengelolaan potensi ekonomi desa melalui BUMDes, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Arena ini menjadi tempat berjalannya praktik-praktik tata kelola yang konkret, di mana prinsip-prinsip demokrasi lokal diuji dan dikembangkan (Sendhikasari et al., 2018).

### ***Governance***

Governance merupakan salah satu teori primer administrasi publik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam penegelolaan dan pelayanan public (Muhammad, 2024). Selain itu, governance juga dapat dipahami secara teoritis, governance atau tata kelola merupakan mindset untuk meluruskan ideologi, paradigma berfikir, kultur, budaya dan sistem manajemen pemerintahan agar memiliki kinerja dan performa yang tinggi. Selain itu, governance juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan maupun menjaga daya saing, kinerja dan performanya (Riset et al., 2012). Menurut konsep governance, pemerintah sebagai administrator publik tidak lagi bekerja sendiri sebagai aktor tunggal, tetapi pemerintah berperan sebagai actor kunci sistem besar pemerintahan yang melibatkan sector swasta (private), warga negara (society), dan institusi lainnya dalam menyelenggarakan dan memenuhi kepentingan publik (Frederickson, 2012). Selanjutnya, Ramli (2012) menambahkan bahwa makna governance mencakup fungsi-fungsi governing board dalam suatu organisasi, seperti asosiasi atau perhimpunan profesi, yang meliputi: (1) pimpinan umum; (2) pembina usaha (undertaking); (3) pembuat kebijakan umum (general policy maker); (4) pembuat peraturan-peraturan (regulation); dan (5) pengawas terhadap eksekutif pembina usaha (undertaking) (Muhammad, 2024).

### ***Good Governance***

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia, namun pemahaman tentang konsep good governance berbeda-beda, dan membayangkan bahwa dengan konsep good governance akan memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, sehingga praktik korupsi menjadi berkurang dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan dan kebutuhan warganya (Ramadhan, 2024). Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah civil society. Good governance bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat) (Ramadhan,



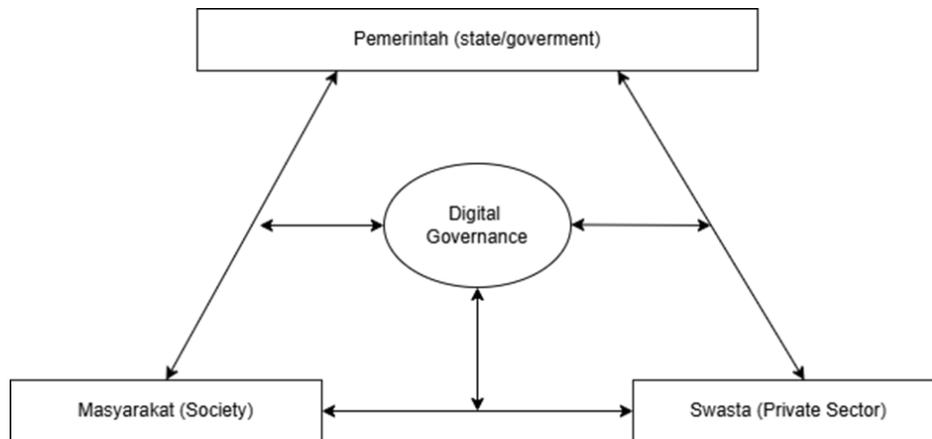
2024). Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa good governance merupakan tata cara suatu negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Sementara itu, Agoes (2013) mendefinisikan good governance sebagai mekanisme pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya (Aryani, 2021).

### **Digital Governance**

Digital governance (tata kelola digital) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mendukung administrasi, manajemen, dan pelayanan publik dengan menetapkan tugas, kerja sama, serta distribusi kewenangan antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kerangka ini memanfaatkan aplikasi dan jaringan digital guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Digital governance juga dikenal sebagai digitalisasi tata kelola pemerintahan yang melibatkan ketiga aktor tersebut dalam manajemen dan pelayanan publik secara produktif, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi. Digital governance pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam bentuk digital. Konsep dan implementasinya diwujudkan melalui sistem informasi manajemen (SIM) yang didukung oleh perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan elektronik (networking), dan sumber daya manusia (brainware), yaitu spesialis (ahli), pelaksana (pengelola), dan pengguna (user) yang memahami teknologi informasi (Muhammad, 2024).

Menurut Karen Osmundsen et al. (2018), digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah struktur socio-teknis. Struktur ini mencakup berbagai komponen, seperti produk, layanan, pengalaman pengguna, dan proses. Aspek socio-teknis mencakup interaksi manusia, hubungan, norma, dan teknologi, yang semuanya saling terkait. Dengan demikian, digitalisasi melampaui sekadar transformasi teknis dari informasi analog ke format digital. Digital governance tidak hanya menyangkut perangkat elektronik, tetapi juga mencakup kebijakan, regulasi, tata kelola, dan kolaborasi antaraktor secara produktif, inovatif, efektif, dan efisien. Yannis Charalabidis dan Zoi Lachana (2020) menyebut bahwa digital governance dirancang untuk mendukung, mengubah, dan meningkatkan aktivitas antara pihak internal dan eksternal pemerintahan dalam menciptakan efektivitas serta efisiensi pelayanan melalui teknologi digital. Tata kelola digital ini melampaui cakupan digital government (pemerintah elektronik) dan mencakup aspek yang lebih luas, termasuk interaksi antaraktor. Burak Erkut (2020) menekankan bahwa dampak digital governance terhadap individu memiliki dua dimensi, yaitu sebagai peluang (a blessing) sekaligus perangkap (a curse). Sebagai peluang, digitalisasi memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam mengubah kebijakan pemerintah, membantu pengusaha menjalankan bisnis dengan birokrasi yang lebih sederhana, dan memfasilitasi pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis data yang lebih transparan serta personal.

Struktur digital governance dapat digambarkan sebagai empat komponen dengan sistem informasi digital sebagai sentral penghubung (komponen 1) antara aktor pemerintah (komponen 2), swasta (komponen 3), dan masyarakat (komponen 4) dalam suatu kolaborasi yang terpadu, sistematis, dan terkoordinasi dalam melaksanakan program penyediaan dan pelayanan publik. Setiap aktor yang terlibat dalam komponen saling memberikan sumber daya secara sinergis untuk mewujudkan pelayanan publik yang kreatif, efektif, efisien, produktif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Muhammad, 2024). Model struktur digital governance dapat dilihat pada Gambar dibawah



*gambar model kerangka digital governace 1*

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena implementasi Program Desa Digital di Desa Sidomulyo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai aktor dalam proses digitalisasi.

### Sumber Data

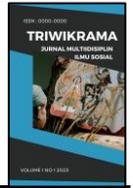
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk perangkat desa, anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan masyarakat pengguna layanan digital. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait yang mendukung analisis.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk menggali informasi mengenai proses implementasi, tantangan, dan dampak aplikasi MallDesa. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam menjelajahi topik yang relevan, (2) Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi masyarakat dengan teknologi digital dan kondisi infrastruktur di Desa Sidomulyo. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika transformasi digital di desa, (3) Dokumentasi Pengumpulan dokumen resmi yang relevan, seperti peraturan desa, laporan kegiatan, dan materi sosialisasi, untuk mendukung analisis dan memberikan konteks tambahan.

### Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, mengikuti empat tahapan utama. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang relevan. Kedua, reduksi data dilakukan untuk menyortir dan memilih data yang lebih penting, serta membuang data yang tidak diperlukan, sehingga informasi yang diperoleh lebih terfokus. Ketiga, penyajian data diarahkan untuk menyusun data yang relevan dalam pola hubungan yang terorganisir, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk merencanakan langkah penelitian selanjutnya. Terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan temuan dan verifikasi data, yang bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan menggunakan metode analisis data ini, penelitian dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL

#### PROGRAM DESA DIGITAL

Program Desa Digital di Desa Sidomulyo mulai diterapkan sejak awal tahun 2022 dengan berbagai perubahan sistem hingga akhirnya menggunakan aplikasi MallDesa sebagai layanan digital utama. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi desa dengan mengurangi birokrasi yang panjang dan memberikan alternatif layanan berbasis digital. Menurut Pak Lutfhi, program desa digital ini diawali dari inisiatif pemerintah desa yang ingin memberikan pelayanan administrasi yang lebih efisien bagi masyarakat.

*"Awal mul tuh sebenarnya sebenarnya dari Pak Kades itu minta untuk dibuatkan semacam aplikasi pelayanan untuk masyarakat untuk mempermudah terutama hal-hal yang kaitannya pertama itu dengan layanan surat-menyurat kemudian laporan warga. Kemudian untuk hal itu kami sanggupi Kemudian ada beberapa tambahan beberapa model gitu ya Mulai dari berita kemudian disitu ada lapak dan beberapa fitur lainnya. Kalau tidak salah kemudian aplikasi itu di launching oleh Kepala Desa Sidomulyo dan itu menjadi Desa pertama Desa digital di kabupaten jember.." (Wawancara, 18 Februari 2025)*

Aplikasi MallDesa tidak hanya digunakan untuk pembuatan surat menyurat, tetapi juga memiliki berbagai fitur lain seperti laporan warga, informasi desa, serta call center berbasis WhatsApp untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Muhammad Ilham dari Media Center Desa Sidomulyo menjelaskan bahwa digitalisasi telah memangkas prosedur layanan yang sebelumnya dianggap rumit.

*"Efisien sih efisien karena mempermudah dan memotong alur pelayanan yang ribetnya minta ampun jadi harus ke desa untuk minta tanda tangan dan sebagainya. Nah itu dipotong alurnya menjadi digital menggunakan MallDesa." (wawancara 11 februari 2025)*

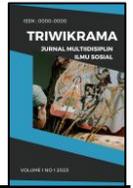
Selain melalui aplikasi MallDesa, pemerintah desa juga menyediakan layanan melalui call center. Menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki keterampilan digital yang memadai untuk menggunakan aplikasi MallDesa, pemerintah desa mengambil langkah strategis dengan menyediakan layanan alternatif berupa call center berbasis WhatsApp. Inisiatif ini didasarkan pada kebutuhan akan solusi yang lebih inklusif, mengingat tidak semua warga, terutama kelompok lanjut usia dan mereka yang kurang familiar dengan teknologi, mampu mengakses dan mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Oleh karena itu, layanan call center ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital untuk keperluan administrasi desa.

*"Karena kalau desa digital itu bukan cuma pelayanan menggunakan aplikasi, tapi WA juga bisa call center gitu, jadi jangan jadi acuan MallDesa tapi call center ini juga bisa menjadi pelayanan." (wawancara 11 februari 2025)*

Penyebaran informasi mengenai layanan digital ini dilakukan melalui berbagai media seperti banner acara dan postingan resmi di media sosial desa, untuk memastikan seluruh warga memahami manfaat serta cara penggunaan layanan digital ini.

*"Nomernya? Eh RT/RW udah tau semua dan sudah banyak yang tau jadi kita ketika ada event ada banner maka dicantumkan, juga lewat postingan-postingan terkait dengan alur pelayanan dan sebagainya."*

Sebagai bagian dari strategi pendanaan, program Desa Digital juga mendapatkan dukungan dari skema Matching Fund dengan Universitas Muhammadiyah Jember. Skema ini merupakan pendanaan yang berasal dari kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra industri untuk mendukung inovasi digital di desa. Dengan adanya Matching Fund, pengembangan infrastruktur teknologi di Desa Sidomulyo dapat berjalan lebih optimal. Dalam dokumen Proposal MallDesa MF 2022, disebutkan bahwa dana dari Matching Fund digunakan untuk pengadaan perangkat keras, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan fitur tambahan dalam aplikasi MallDesa. Hal ini mempercepat implementasi program Desa Digital dan membantu desa dalam mengatasi kendala teknis.



## KOLABORASI AKTOR

Pelaksanaan Program Desa Digital melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Pemerintah desa, RT/RW, serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berperan aktif dalam menggerakkan ekosistem digital di tingkat desa. RT/RW berfungsi sebagai operator tingkat kedua yang secara langsung membantu masyarakat dalam mengakses layanan digital. Mereka menjadi penghubung utama antara warga dan sistem digital yang diterapkan oleh desa. Peran mereka mencakup pendampingan warga dalam penggunaan aplikasi layanan desa.

*“orang-orang yang memang punya HP tapi tidak bisa menggunakan malldesa seperti orang tua, orang tua kalau membuat surat masih dibantu oleh rt/rw. Jadi untuk masyarakat yang tidak punya hp juga bisa membuat surat melauai rt/rw baik menggunakan malldesa atau call center, RT/RW itu terlibat dalam jadi operator Kedua lah mereka yang melaksanakan dan mereka yang membantu juga.”*  
(wawancara 11 februari 2025)

Di sisi lain, KIM memiliki peran penting dalam literasi digital. Mereka bertugas untuk menyosialisasikan manfaat dan penggunaan layanan digital kepada masyarakat. Literasi digital yang diberikan oleh KIM mencakup pemahaman dasar tentang teknologi, keamanan data, serta pemanfaatan layanan digital untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan KIM sangat krusial dalam memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara efektif.

*“Kalau KIM itu sekedar literasi digital (sosialisasi) ya itu peran masing-masing.”* (wawancara 11 februari 2025)

Dalam pengembangan infrastruktur digital, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan perusahaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital desa dengan menghadirkan teknologi yang dapat mendukung pelayanan publik secara lebih efisien. Perusahaan mitra juga memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan desa digital. Selain menyediakan infrastruktur teknologi, mereka turut memberikan dukungan penuh dalam pengembangan aplikasi standar untuk layanan pemerintahan desa. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan digital berjalan optimal dengan dukungan teknis selama 24 jam penuh.

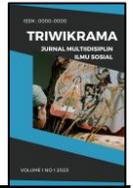
*“Kalau secara peran, kami di perusahaan mendukung penuh untuk dijadikan sebagai aplikasi atau standar aplikasi untuk di pemerintahan desa digital. Kami akan melakukan support penuh baik dari sisi aplikasi, persiapan infrastruktur, dan kesiapan teknologi.”*  
(wawancara 18 februari 2025)

Keberlanjutan layanan digital menjadi prioritas utama bagi perusahaan mitra. Oleh karena itu, mereka menyediakan tenaga ahli yang siap memberikan dukungan teknis selama 7 hari 24 jam. Hal ini memastikan bahwa layanan digital tetap beroperasi dengan baik tanpa adanya kendala teknis yang dapat menghambat pelayanan masyarakat.

*“Layanan digital itu kalau secara waktu pasti 24 jam kerja, artinya kita juga akan menyediakan SDM untuk melakukan support aplikasi selama 7 Hari 24 Jam, sehingga kita support penuh.”* (wawancara 18 februari 2025)

Selain penyediaan infrastruktur, perusahaan juga memberikan saran agar program ini lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi. Meskipun mayoritas masyarakat telah memiliki perangkat ponsel pintar, tantangan utama bukanlah kesenjangan teknologi, melainkan bagaimana membiasakan masyarakat untuk menggunakan layanan digital dengan lebih optimal.

*“Sebenarnya kalau secara masyarakat kita itu kan sudah 80-90% punya handphone. Jadi bukan soal gptek, tapi lebih ke bagaimana kita mensupport proses sosialisasi dan literasi terhadap aplikasi ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah contoh langsung dan pembiasaan saja.”* (wawancara 18 februari 2025)



Namun, salah satu kendala utama dalam implementasi Program Desa Digital adalah keterbatasan anggaran. Meskipun pemerintah desa memiliki alokasi anggaran tahunan untuk program MallDesa, dana yang tersedia untuk sosialisasi dan literasi digital masih tergolong minim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan digital secara optimal.

*“KIM okelah masih bisa memberikan literasi digital tapi anggarannya lah, anggaran MallDesa ada tiap tahun tapi untuk sosialisasi nggak banyak lah.” (wawancara 11 februari 2025)*

## **TANTANGAN DESA DIGITAL**

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di masyarakat. Masih banyak warga yang kesulitan menggunakan aplikasi layanan digital dan lebih memilih meminta bantuan RT/RW. Hal ini menjadi kendala dalam pemerataan penggunaan layanan digital.

*“Tantangannya itu bagaimana kita harus meratakan pengetahuan terkait dengan penggunaan aplikasi, karena masih belum merata jadi masih beberapa orang lah. Kalau bisa dikatakan kita masih 50% yang pasti kita literasi digital selebihnya itu orang-orang yang memang punya HP tapi tidak bisa menggunakan MallDesa.” (wawancara 11 februari 2025)*

Sebagai upaya meningkatkan literasi digital, pemerintah desa telah menyusun Panduan Manual Book sebagai dokumen referensi bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi MallDesa. Panduan ini mencakup tata cara pendaftaran, penggunaan fitur layanan, serta penyelesaian masalah teknis yang mungkin muncul. Harapannya, dengan adanya panduan ini, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengakses layanan digital tanpa harus bergantung pada pihak lain.

Selain itu, preferensi masyarakat terhadap aplikasi pesan instan seperti WhatsApp juga menjadi tantangan tersendiri bagi adopsi MallDesa. Masyarakat lebih terbiasa menggunakan WhatsApp karena kemudahannya dibandingkan aplikasi MallDesa.

*“Kalau mau dihitung sekarang, lebih banyak orang yang menggunakan WhatsApp karena lebih mudah daripada MallDesa.” (wawancara 11 februari 2025)*

Di sisi lain, masalah teknis juga sering menjadi keluhan pengguna MallDesa. Salah satu kendala yang dihadapi adalah seringnya terjadi maintenance pada aplikasi, yang menyebabkan gangguan dalam akses layanan digital.

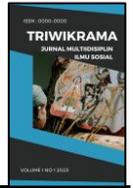
*“Keluhannya adalah kalau dari segi MallDesa seringkali aplikasi kita itu terjadi maintenance.” (wawancara 11 februari 2025)*

Selain berbagai tantangan teknis dan preferensi masyarakat, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang menghambat upaya sosialisasi digital. Meskipun anggaran tahunan untuk MallDesa tersedia, dana yang dialokasikan untuk sosialisasi dan literasi digital masih sangat terbatas.

*“Anggaran MallDesa ada tiap tahun, tapi untuk sosialisasi gak banyak lah Cuma itu sih.” (wawancara 11 februari 2025)*

## **PEMBAHASAN PARTNERSHIP**

Kemitraan antara pemerintah desa, pihak swasta, dan masyarakat dalam Program Desa Digital di Desa Sidomulyo mencerminkan penerapan teori partnership yang menekankan pentingnya kolaborasi formal antara berbagai aktor. Dalam konteks ini, setiap mitra memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi, di mana pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyediakan akses dan informasi kepada masyarakat, sementara pihak swasta menyediakan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Kesepakatan antar-aktor menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan efisiensi layanan publik. Dalam perspektif digital governance, kemitraan ini juga menciptakan ruang bagi transparansi dan akuntabilitas. Setiap aktor dapat berkomunikasi secara terbuka dan memberikan umpan balik tentang pelaksanaan program, yang memungkinkan mereka untuk



saling mendukung dan memperbaiki proses yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak swasta tidak hanya terbatas pada pengembangan aplikasi, tetapi juga mencakup sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun di Desa Sidomulyo bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, untuk memaksimalkan efektivitas kemitraan ini, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antar-aktor. Dengan demikian, program Desa Digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan layanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

### **Akuntabilitas**

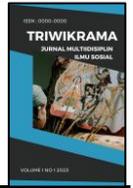
Akuntabilitas dalam digital governance mengacu pada tanggung jawab pemerintah desa dalam menyediakan, mengelola, dan memastikan sistem digital berjalan dengan baik. Pemerintah desa telah berupaya menghadirkan sistem digital yang efisien, seperti aplikasi MallDesa, untuk mempermudah pelayanan publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, yang menyebabkan seringnya maintenance pada aplikasi MallDesa karena server yang masih berskala kecil karna merupakan aplikasi mandiri. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan menyediakan alternatif layanan digital, yaitu call center berbasis WhatsApp. Layanan ini memungkinkan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan MallDesa tetap mendapatkan akses pelayanan publik secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab dalam memastikan layanan digital tetap berjalan, meskipun menghadapi kendala teknis. Selain itu, akuntabilitas juga tercermin dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa, di mana informasi terkait layanan digital/nomor call center disebarluaskan melalui banner, postingan media sosial, serta pertemuan-pertemuan dengan RT/RW.

### **NETWORKING**

Program Desa Digital di Desa Sidomulyo menunjukkan bahwa networking antara pemerintah desa, pihak swasta, dan masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi program ini. Teori networking menjelaskan bahwa koneksi atau hubungan kerja antara satu aktor dengan aktor lain dimulai dari proses pertukaran pesan, ide, dan gagasan. Dalam konteks ini, para aktor yang memiliki latar belakang berbeda dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi publik yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi layanan administrasi desa. Dalam pelaksanaan Program Desa Digital, terlihat bahwa adanya jaringan yang baik memungkinkan setiap aktor untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Misalnya, pemerintah desa berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyediakan akses kepada layanan, sementara pihak swasta memberikan dukungan teknis dan infrastruktur yang diperlukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru bagi inovasi dan pengembangan layanan yang lebih baik.

Networking ini menciptakan hubungan kerja yang terintegrasi, di mana setiap aktor dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, para aktor dapat dengan mudah mengontrol dan mengevaluasi kemajuan program, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif. Namun, untuk memaksimalkan potensi jaringan ini, penting bagi semua pihak untuk terus berkomunikasi dan berbagi informasi, agar setiap aktor tetap terlibat dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil temuan ini, saya berargumen bahwa keterkaitan antara teori networking dan implementasi Program Desa Digital sangat jelas. Jaringan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Program Desa Digital di Sidomulyo tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan layanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kolaborasi yang kuat antara berbagai aktor, yang pada akhirnya dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.



## **SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting dalam digital governance karena merekalah yang mengelola, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem digital agar dapat diadopsi oleh masyarakat secara luas. Dalam program Desa Digital Sidomulyo, SDM yang terlibat terdiri dari operator RT/RW, tenaga teknis dari perusahaan mitra, serta KIM yang bertugas meningkatkan literasi digital warga. Namun, tantangan dalam aspek SDM adalah masih rendahnya literasi digital di masyarakat, yang menyebabkan banyak warga masih bergantung pada RT/RW untuk menggunakan layanan digital. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat pelaksanaan pelatihan yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam perspektif digital governance, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dalam mengoperasikan dan menggunakannya. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan program pelatihan berkelanjutan, baik melalui pelatihan langsung maupun modul e-learning yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja.

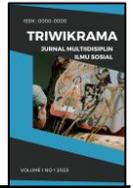
### ***Partisipasi***

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital desa cukup tinggi, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa digital terbilang besar, tetapi masyarakat lebih banyak yang menggunakan WhatsApp dibandingkan aplikasi MallDesa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemudahan penggunaan WhatsApp dibandingkan MallDesa, serta kebutuhan untuk mengisi berbagai form di MallDesa yang dianggap lebih ribet. Selain sebagai pengguna, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung program digital desa. RT/RW di desa turut serta sebagai operator layanan digital, membantu masyarakat yang tidak memiliki HP atau yang kurang memahami penggunaan teknologi digital dalam mengakses layanan administratif. Sementara itu, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertugas memberikan literasi digital kepada warga desa. Namun, tantangan dalam partisipasi ini adalah masih adanya kesenjangan literasi digital, terutama di kalangan orang tua yang belum terbiasa dengan teknologi, serta keterbatasan anggaran untuk sosialisasi yang membuat edukasi terkait layanan digital belum maksimal. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang cukup aktif dalam layanan digital, tetapi masih didominasi oleh WhatsApp, pemerintah desa perlu melakukan optimalisasi sistem MallDesa agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh warga. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan evaluasi layanan digital juga perlu diperkuat agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

### ***Efektifitas***

Efektivitas dalam digital governance mengacu pada sejauh mana sistem digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Penerapan digitalisasi melalui aplikasi MallDesa memang berhasil memotong alur birokrasi yang sebelumnya rumit. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor desa untuk mengurus administrasi, karena semua bisa dilakukan secara digital. Namun, dalam praktiknya, efektivitas MallDesa masih menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi tingkat adopsi dan kepuasan masyarakat.

Salah satu kendala utama adalah seringnya maintenance pada aplikasi MallDesa, yang disebabkan oleh server terbatas karena aplikasi ini dibuat secara mandiri. Akibatnya, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan, yang menyebabkan mereka lebih memilih menggunakan WhatsApp sebagai alternatif utama. Selain itu, aplikasi MallDesa juga dianggap kurang user-friendly, karena masyarakat harus mengisi berbagai form untuk mengajukan permohonan administrasi, sementara melalui WhatsApp, mereka cukup mengirim foto dokumen yang dibutuhkan tanpa perlu mengisi banyak data. Pemerintah desa menyadari kendala ini dan mencoba meningkatkan efektivitas layanan dengan menyediakan layanan call center berbasis WhatsApp. Dengan layanan ini, masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan publik meskipun aplikasi MallDesa sedang mengalami gangguan. Namun, solusi ini juga menunjukkan bahwa MallDesa belum sepenuhnya efektif sebagai platform utama layanan digital, karena masyarakat masih lebih banyak bergantung pada WhatsApp. Untuk meningkatkan efektivitas digital governance, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap MallDesa, seperti memperbaiki aksesibilitas aplikasi, dan meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih banyak warga yang bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur server yang lebih stabil serta anggaran untuk sosialisasi



dan pengembangan aplikasi juga diperlukan agar digitalisasi layanan publik benar-benar berjalan optimal dan berkelanjutan.

### **Digital inclusion**

Penerapan digital inclusion atau inklusi digital merupakan aspek penting dalam pengembangan Desa Digital Sidomulyo. Inklusi digital mengacu pada upaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat desa, tanpa terkecuali, memiliki akses yang merata terhadap teknologi digital serta kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif. Penerapan inklusi digital di Desa Sidomulyo menjadi sangat penting agar program Desa Digital tidak hanya sekedar formalitas atau pembangunan infrastruktur semata, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat adanya keragaman demografis dan geografis di desa, tanpa inklusi digital, terdapat kemungkinan besar bahwa sebagian warga khususnya kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas akan tertinggal dalam proses transformasi digital. Ketimpangan ini bisa menghambat keberhasilan program secara keseluruhan karena partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan desa digital yang berdaya dan berkelanjutan.

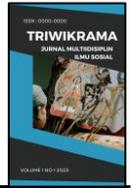
Kesenjangan digital di mana hanya kelompok tertentu saja seperti generasi muda atau masyarakat yang memiliki sumber daya lebih yang dapat menikmati manfaat dari transformasi digital desa. Inklusi digital juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Melalui pemanfaatan teknologi yang inklusif, warga desa dapat lebih mudah mengakses informasi dan memberikan masukan. Ini menjadi pondasi penting dalam praktik digital governance di tingkat lokal. Selain itu, efektivitas layanan publik berbasis digital seperti layanan administrasi kependudukan, pengajuan surat, maupun akses terhadap informasi bantuan social sangat bergantung pada kemampuan warga untuk memahami dan menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital, penyediaan fasilitas internet publik, serta pendampingan teknis menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh warga dapat terlibat aktif.

Inklusi digital juga membantu memperkuat aspek keberlanjutan program. Ketika seluruh warga memiliki akses dan keterampilan digital yang memadai, mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif dalam mengembangkan layanan, maupun inovasi lokal berbasis digital. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang dinamis dan mandiri di tingkat desa, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Oleh karena itu, tanpa inklusi digital yang menyeluruh, transformasi digital di Desa Sidomulyo dikhawatirkan hanya akan menguntungkan segelintir pihak, dan pada akhirnya gagal memenuhi tujuan utama dari program desa digital, yaitu pemerataan akses, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkeadilan.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Desa Digital di Desa Sidomulyo telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip digital governance seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi indikator keberhasilan transformasi tata kelola desa berbasis teknologi. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan aplikasi MallDesa sebagai platform layanan publik digital, peran aktif Media Center dalam penyebaran informasi, serta kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam peningkatan literasi digital masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori partnership dan networking, Desa Sidomulyo juga menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, yang saling mendukung dalam pengembangan infrastruktur, pelatihan digital, hingga pemanfaatan layanan. Selain itu, teori SDM turut tercermin melalui pelibatan operator media, perangkat desa, dan masyarakat sebagai pengguna aktif teknologi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya penggunaan MallDesa, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Desa Digital di Desa Sidomulyo telah berjalan cukup baik dan secara umum sesuai dengan konsep teori digital governance dan teori pendukung lainnya, namun masih memerlukan upaya lanjutan dalam aspek penguatan kapasitas SDM, pemerataan literasi digital, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi agar program ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan.



## Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas Program Desa Digital di Desa Sidomulyo.

### 1. Peningkatan Infrastruktur

Pemerintah desa perlu memperkuat infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai, untuk mendukung implementasi program digital secara efektif.

### 2. Pelatihan yang Berkelanjutan

Diperlukan program pelatihan yang intensif dan berkesinambungan bagi seluruh pegawai dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan layanan digital.

### 3. Optimalisasi Aplikasi MallDesa

Pemerintah desa harus melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi MallDesa, termasuk perbaikan aksesibilitas dan user-friendliness, agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat.

### 4. Sosialisasi dan Literasi Digital

Upaya sosialisasi mengenai manfaat dan cara penggunaan layanan digital perlu ditingkatkan, terutama melalui kegiatan yang melibatkan RT/RW dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Program Desa Digital di Desa Sidomulyo dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, serta menjadi model bagi desa-desa lain dalam penerapan digital governance.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, M. D. S. (2021). *Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul*. 2013, 1-23.
- Budiman, I. F. (2024). Transformasi Digital Di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sebagai Implementasi Good Governance. *Neraca, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2 (3), 70-78.
- Muhammad, A. A. (2024). *digital governance: Model baru kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam Administrasi Publik*.
- Qadiri, F. S., & Wicaksono, I. (2023). Inovasi Digital Berbasis Aplikasi Mall Desa dalam Sektor Pengembangan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.115>
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55-67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Sendhikasari, D., L., D. S., & D., S. C. (2018). *Tata kelola pembangunan desa*.
- Mahendra, GS, & Nugraha, PGSC (2021). Pelatihan perangkat desa dalam penggunaan sistem pengaduan online berbasis web (ec-resolver) untuk menuju desa digital. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5 (3), 918-929.
- Rusdianto, AS, Sinatria, BR, Anarki, BGR, Ramadhani, CPE, Pradana, DA, Putri, DR, ... & Rahmadani, RA (2022). Digitalisasi Informasi Desa Bendelan Melalui Program Desa Digital Terintegrasi di Desa Bendelan Bondowoso. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2 (6), 727-733.
- Ainiyah, R., Burhan, S., Ardiansyah, MF, & Fidanti, DP (2021). Pengembangan Desa Digital Sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Desa Karangrejo. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 2 (2), 13-18.
- Anggraini, R., Baharuddin, MR, & Wafda, A. (2023). Membangun Desa Digital untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kemandirian Masyarakat Desa Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal IPMAS*, 3 (3), 183-191.
- Angkasa, N. (2024). Smart Village Sebagai Bentuk Good Village Governance Menuju Era Desa Digital.

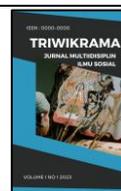
---

## Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 7, Number 11, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



- Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum , 3 (01), 23-29.
- Aranta, A., Wijaya, IGPS, Dwiyanaputra, R., Husodo, AY, Nugraha, GS, Bimantoro, F., & Wesa, MDP (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Digital Pada Masyarakat Desa Gumantar Kabupaten Lombok Utara Guna Mendukung Program Desa Digital. Jurnal Abdi Insani , 10 (4), 2096-2104.
- Kurniawan, A., Indarso, AO, Sembada, WY, & Anwar, K. (2021). Pemberdayaan Literasi Digital di Desa Waringin Kurung, Cimanggu, Pandeglang. Jurnal Keterlibatan Masyarakat Indonesia , 2 (2), 96-115.
- Oktavianty, O., & Djafar, MF (2024). Maksimalisasi Penggunaan Aplikasi Digital Dalam Menunjang Administrasi Perangkat Desa Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Jurnal Kemanusiaan Dan Pendidikan (JAHE) , 4 (1), 300-305.
- Utami, MM, Manurung, R., & Nugroho, FA (2021). Dekomigital (Desa Ekonomi Digital): Strategitransformasi Umkm Desa Digital Sebagai Upaya Pemulihan Perekonomian Pada Masa Pandemi Di Indonesia. Jurnal Inspire: Analisis Ekonomi dan Pembangunan , 1 (2), 213-234.